

MENGINGAT PENGALAMAN MINORITAS: NARASI SUNYI PENGALAMAN PELADANG PEREMPUAN (Kajian Pustaka Program Food Estate Kalimantan Tengah)

Oleh:

Evi Nurleni¹

¹Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya

email: evinurleni@gmail.com

ABSTRACT

Development and modernity are concepts that a positivist perspective, which views both humans and the universe as materials that can be utilized for the benefit of securities or economic security, example the food estates program which are seen as post-pandemic national food security. In the structure of the political economy, the narrative of local experiences and women cultivators becomes silent in conversation because they are not in accordance with the interests of development and modernity. The silent narrative of the experience of women cultivators in the perspective of historical materialism seeks to critically place women's narratives in the patriarchal system and capitalism. The history of women's experiences is the history of minority groups (herstory); which shows that they are a minority group as a non-working class in the patriarchal concept, and materialist in the capitalist concept. Women become objects of development and minority groups whose voices are never heard. In this case, efforts to reformulate the women's empowerment movement must be carried out without creating antagonism. The search for a way without antagonism is carried out by formulating the philosophy of the minority as a narrative materialism herstory in a socialist and radical feminist approach.

Keywords: *Women, Food Estate, Socio-Herstory, Women's Empowerment Movement*

ABSTRAK

Pembangunan dan modernitas merupakan konsep yang berperspektif positivis, yang memandang baik manusia dan alam semesta sebagai materi yang dapat didayagunakan untuk kepentingan sekuritas atau pengamanan ekonomi, seperti *food estate* yang dilihat sebagai pengamanan pangan nasional paska pandemi. Dalam struktur ekonomi politik, narasi pengalaman lokal dan perempuan peladang menjadi sunyi dalam percakapan karena tidak bersesuaian dengan kepentingan pembangunan dan modernitas. Narasi sunyi pengalaman peladang perempuan dalam perspektif materialisme historis berupaya menempatkan secara kritis narasi perempuan dalam sistem patriarki dan kapitalisme. Sejarah pengalaman perempuan adalah sejarah kelompok minoritas (*herstory*); yang menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok minoritas sebagai yang bukan kelas pekerja dalam konsep patriarki, dan materialis dalam konsep kapitalis. Perempuan menjadi obyek pembangunan dan kelompok minoritas yang suaranya tidak pernah terdengar. Dalam hal ini upaya mereformulasi gerakan pemberdayaan perempuan harus dilakukan tanpa menimbulkan antagonisme. Pencarian jalan tanpa antagonisme dilakukan

dengan memformulasikan filsafat kaum minoritas sebagai narasi materialsme herstory dalam pendekatan feminis Sosialis dan radikal.

Kata Kunci: *Perempuan, Food Estate, Sosio-Herstory, Gerakan Peremberdayaan Perempuan*

PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan sebuah hasil eksplorasi pustaka, yang menjoba untuk memberi padangan pada keyakinan pemangku kebijakan tentang efek dari pandemi covid-19 terhadap ketahanan pangan nasional dalam masa dan paska pandemi, dengan didukung analisis FOA. Pemerintah akan melakukan pengembangan program *food estate* di Kalimantan Tengah dengan menggunakan lahan sebanyak 190 ribu hektar. Lemhanas misalnya membingkai analisisnya dalam dua persepektif teori yakni teori Neo-Malthusian dan kelangkaan pangan dan konsep sekuritisasi Mazhab Compenhagen dan keamanan internasional nonkonvensional. Teori Neo-Malthusian tentang ketahanan pangan mengatakan bahwa “kelangkaan sumber daya terbarukan dapat memicu konflik antar makhluk hidup, dari skala terkecil seperti tetangga komunitas kecil hingga skala masif seperti perang antar Negara”. Asumsinya, ketahanan pangan yang kuat adalah salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi krisis yang dapat terjadi akibat kelangkaan sumber daya. (Basundoro & Sulaeman, 2020)

Sementara konsep sekuritisasi adalah didefinisikan sebagai proses suatu aktor memaknai isu sebagai isu keamanan, dimana peran tindakan, narasi, retorika, dan pernyataan aktor terkait dengan isu keamanan memiliki peran penting dalam sekuritisasi. Tujuan sekuritisasi adalah membentuk kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan yang mungkin dialaminya. Bahwa pandemi covid-19 memiliki efek ganda terhadap kehidupan masyarakat, termasuk ketahanan pangan nasional. (Arrigo, 2018)

Landasan teoritis kebijakan proyek *food estate* bagi institusi-institusi terkait mengedepankan ketahanan pangan sebagai strategi non konvensional dalam menghadapi ancaman pandemi. Dengan pendekatan dan paradigma positivistik dengan didukung data-data empirik. Jejak positivistik dapat ditemukan dalam kepercayaan pada teori neo-malthusian dan konsep sekuritisasi dan evolusionis dalam jejak sejarah ketahanan pangan dan pandemi sebagai fenomena global. Historisitas itu dirangkai sejak masa Yunani Kuno, Irlandia abad ke-19, Spanyol awal abad ke-20, Iran dalam PD I untuk menegaskan pandemi memiliki aspek geopolitik dan geoeonomi, yang dapat mengakibatkan krisis multisektoral tersebut. Bahkan lebih jauh konteks, gerakan sosial revolusioner Arab Musim Semi tahun 2011 menjadi fakta sosial yang memperkuat bahwa tidak hanya krisis tapi juga konflik bukan revolusi. Sehingga, isu ketahanan pangan dan pandemi menjadi isu yang krusial dan masuk akal. (Basundoro & Sulaeman, 2020)

Pemerintah memberi prediksi bahwa pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah, pada esks lokasi program Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar, dapat menghasilkan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat sekaligus memberikan sumbangsih bagi pemasukan petani lokal. Apabila program *food estate* sudah berkembang, maka dapat menjadi dorongan baik untuk sektor produksi (barang penunjang pertanian seperti pupuk, mesin pertanian) maupun konsumsi nasional (meningkatnya pemasukan sektor pertanian), yang berakibat kepada terbukanya lapangan

pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan semakin terwujudnya keadilan sosial-ekonomi. (*Program Food Estate Berdampak Positif Bagi Lapangan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi - KALTENGTIMES*, n.d.) Artikel ini bisa jadi merupakan gambaran keberpihakan yang kuat terhadap konsep pembangunan dan modernitas yang dibingkai dalam konsep ketahanan pangan dan sekuritisasi pada Negara atau pemerintah.

Pertanyaan kemudian apa yang hilang dari percakapan seperti yang di atas? Masyarakat dan lokalitas menjadi narasi yang dilupakan, masyarakat menjadi penerima program dan sasaran kebijakan modernisasi. Narasi besar tentang *food estate*, melupakan narasi petani lokal dan perempuan petani yang berjuang lebih besar melawan kelangkaan pangan. peladang dan perladang perempuan menjadi komunitas yang terlupakan dan terpinggirkan atau menjadi narasi sunyi kelompok minoritas pada umumnya.

Kajian ini mencoba untuk mengedepankan bagaimana kondisi kelompok minoritas dalam hal ini perempuan peladang dalam konstelasi geopolitik terkait dengan pembangunan ketahanan pangan dalam konstelasi kepentingan pangan lokal, regional, nasional dan internasional. (Suradinata, 2016) Kajian ini menggunakan pendekatan materialisme historis, yang memandang bahwa kondisi material kehidupan manusia termasuk kegiatan dan hubungan berubah sepanjang waktu karena dinamika yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sejarah dipahami sebagai rekaman-rekaman perubahan kondisi material dalam kehidupan kelompok dan perubahan kolektif dalam pengalaman, kepribadian, ide-ide dan susunan sosial. Dalam hal ini, pengalaman, kepribadian, ide dan susunan sosial perempuan dalam masyarakat. (Ritzer, 2019)

Kajian ini akan mencoba melacak secara historis penjelasan mengenai kondisi-kondisi material suatu kelompok dan mata rantainya, pengalaman, kepribadian, kejadian, ide dan

susunan sosial yang khas kelompok itu, khusus kondisi dominasi dan relasi eksploitatif. Sehingga pengalaman dominasi dan relasi eksploitatif itu adalah pengalaman sejarah. Sejalan dengan pendekatan feminis sosialis, yang akan melihat aspek kesadaran, motivasi, ide, definisi sosial atas situasi, pengetahuan, teks-teks dan ideologi yang mempengaruhi secara mendalam kepribadian, tindakan dan superstruktur dominasi. Aspek-aspek subjektifitas manusia dihasilkan oleh struktur sosial yang terkait dan susunan eksploitatif dalam pola memperkaya dan memiskinkan. Sehingga pemberdayaan kelompok minoritas dan terpinggirkan akan selalu bersifat politis-ekonomis dan kultural. Atau dekonstruksi terhadap struktur yang mendominasi dan eksploitatif.

Kajian ini melihat ketidaksetaraan sosial dalam struktur ekonomi, kebijakan dan ideologi yang menopang sistem dominasi. Untuk memetakan sistem ini, maka analisis dilakukan dengan memetakan sistem dominasi publik dan pencarian situasional melalui pengalaman sehari-hari kaum tertindas. Perlibatan kaum tertindas baik individu atau kelompok diharapkan dengan cara yang besar atau kecil akan belajar bertindak dalam memperjuangkan emasipasi kolektif mereka.

Selanjutnya, kajian ini berkontribusi untuk membangun kerangka *gender empowerment* yang mengelaborasi kekuatan masyarakat dan negara secara bersama-sama dan juga mengelaborasi kekuatan perempuan dan laki-laki dalam perjuangan yang sama. Pemberdayaan gender bertujuan untuk meningkatkan kepekaan gender tidak hanya pada perempuan tetapi juga laki-laki yang cenderung bias dalam konstruksi; laki-laki dan perempuan melampaui identitas gender mereka dan bekerja sama untuk mengubah struktur hubungan gender dari hierarkis menjadi egaliter. (Sharma, 2000)

MEMBANGUN KERANGKA TEORITIS

1. Materialisme Historis sebagai Perspektif

Materialisme historis merupakan perluasan prinsip dari materialisme dialektis tentang studi mengenai masyarakat dan sejarahnya. Memahami materialisme dialektis tidak dapat tanpa memahami pemikiran kritis Karl Marx terhadap materialisme Feuerbach dan dialektika Hegel. Tidak ingin menyederhanakan, materialisme dialektis dipahami sebagai cara mendekati gejala sosial dengan memahaminya secara dialektis, sedangkan interpretasi mengenai gejala sosialnya materialis. Marx melihat fakta sosial sebagai entitas material yang nyata, seperti pekerjaan, kekayaan dan negara, bukan hanya ide-ide seperti yang dipahami Hegel. Oleh sebab itu, masalah-masalah kehidupan modern bisa dibaca melalui sumber-sumber material, contohnya struktur kapitalis, dan juga patriarki. Marx memandang bahwa dunia merupakan dunia sosial seluruhnya, bukan dunia agamis seperti yang dipahami oleh Feuerbach. Marx secara khusus melihat dunia sosial melalui sektor ekonomi yang politis. Bahwa dunia material tersusun dalam relasi-relasi ekonomi kapitalis yang membentuk sistem kelas sosial dan juga kekuasaan. (Farihah, 2015)

Marx mengkritisi kapitalisme dalam perspektif materialisme atas sejarah, karena ia percaya bahwa sejarah akan bergerak ke arah yang dapat diprediksi. Secara umum, materialisme historis Marx memahami bahwa cara orang menyediakan kebutuhan materialnya akan menentukan dan membentuk hubungan sosial dan lembaga sosial. Karena pentingnya penyediaan material ini, akan membentuk hubungan-hubungan ekonomi dan menurutnya sejarah manusia itu digerakan oleh usaha-usaha memenuhi kebutuhan material ini. Sementara itu, kebutuhan-kebutuhan material itu juga berubah secara historis, yang menimbulkan kekuatan-kekuatan produksi material, seperti mesin dan pabrik. Perubahan

dan transformasi kebutuhan-kebutuhan material inilah yang menjadi mesin sejarah manusia. (Farihah, 2015)

Dalam masyarakat kapitalis, hubungan sosial dalam menyediakan kebutuhan material terjadi dalam relasi-relasi hak milik, dimana kapitalis memiliki alat produksi dan buruh upahan tidak memilikinya. Relasi hak milik ini berkembang menjadi kewajiban dan tugas dalam konsep kerja. Marx melihat relasi produksi yang demikian cenderung mengarah pada konflik kelas dan memiliki efek dalam relasi-relasi keluarga dan pribadi. Contohnya, prasyarat awal kapitalisme bahwa pekerja yang baik adalah laki-laki yang meninggalkan rumahnya untuk bekerja, menghasilkan defenisi gender biner yaitu perempuan baik ialah yang mengurus anak-anak di dalam rumah. Feminis sosialis melihat bahwa relasi gender biner ini diperkokoh juga oleh ideologi patriarki. (Armstrong, 2020)

Marx melihat sejarah dalam sudut pandang yang dinamis, bahwa sebagaimana kekuatan-kekuatan produksi berubah ditangan kapitalis, terjadi pula perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mengubah relasi-relasi produksi itu. Gerakan sosial atau revolusi sering diperlukan untuk mengubah relasi-relasi produksi ini. Sumber utama revolusi adalah kontradiksi materi antara kekuatan-kekuatan produksi dan relasi-relasi produksi tersebut. Dan perubahan yang revolusioner akan terjadi jika pihak yang dieksploitasi merapatkan barisan untuk mendukung perubahan dalam relasi produksi tersebut. Kondisi ideal yang secara politik dihindari oleh kelas penguasa karena akan mengubah tatanan sosial yang terlalu besar. (Gurley, 2016)

Revolusi dalam hal ini juga dipahami sebagai sebuah upaya mengembalikan alienasi kelas pekerja pada kerja sebagai hakekat manusia. Maka tugas revolusioner adalah membangunkan “kekuatan-kekuatan yang tidur pulas” untuk mencapai tujuan-tujuan emansipatoris. (Gurley, 2016) Penulis percaya,

dalam masyarakat baru kekuatan-kekuatan ini bisa “dibangunkan” dengan menarasikan pengalaman kaum tertindas dan minoritas. Dalam tulisan ini diarahkan pada pengalaman perempuan peladang sebagai kelompok minoritas.

2. Pendekatan Sosio-Herstory Sebagai Perspektif

Kata sejarah dalam bahasa Inggris ditulis *history*. Secara etimologis kata ini berasal dari bahasa Yunani “*historia*” yang berarti ilmu, inkuiri (*inquiry*), wawancara (*interview*), interogasi dari seorang saksi-mata. Sejarah dalam konsep *history* memperlihatkan konstruksi sejarah kaum maskulin atau sejarah dalam perspektif laki-laki. (Outhwaite et al., 2011) Dengan menyebutkan *herstory* tulisan ini mencoba untuk menuliskan sejarah dari perspektif feminis dan menekankan pada peran perempuan sebagai aktor yang bercerita. *Herstory* merupakan kritik feminis terhadap historiografi konvensional yang secara tradisional ditulis dari sudut pandang laki-laki. Sebagai metodologi, *herstory* mendayagunakan cara-cara atau prosedur untuk melakukan sesuatu penyelidikan atau penelitian sejarah konvensional tetapi mengubah perspektifnya. (Dittmar & Entin, 2016)

Metode menyangkut “bagaimana orang memperoleh pengetahuan” (*how to know*), sedangkan metodologi adalah ilmu tentang “untuk tahu bagaimana harus mengetahui” (*to know how to know*). Menurut penulis, metode sejarah adalah cara-cara serta prosedur atau teknik untuk merekonstruksi peristiwa sehari-hari menjadi sejarah yang mendeskripsikan *as actuality*. Melalui metode diperoleh eksplanasi genesis untuk menghasilkan satu bentuk cerita yang deskriptif naratif. (Jrob, 1885)

Metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*herstory as past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*herstory as written*). Dengan karakteristik penelitian sejarah

akan dilakukan tahapan heuristic, verifikasi, interpretasi dan herstorografi. Penelitian ini untuk menemukan pola-pola atau struktur peristiwa sejarah yang didayagunakan menjelaskan kompleksitas kehidupan manusia yang tercermin dalam peristiwa sejarah yang memiliki sifat multidimensional itu. Dalam kaitan ini bagaimana perempuan memaknai peristiwa keseharian sebagai peristiwa ekonomi, sosial dan kultural sebagai bagian dari kesadaran dunia yang telah dikonstruksi oleh sistem kapitalis dan patriarkis. (Jrob, 1885)

Kajian ini menggunakan pendekatan sosio-historis yang melihat perubahan geopolitik di kawasan eks Proyek Setuja Hektar Lahan Gambut (PLG), untuk pengembangan pangan nasional (*food-estate*) sebagai sebuah sejarah panjang yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat lokal hari ini, terutama perempuan. Program pembangunan dihadirkan tidak hanya mengubah sejarah hidup masyarakat, tetapi juga mengganti peradaban masyarakat tradisional dengan modernitas.

Dalam hal ini, sejarah dilihat dalam makna yang terkait dengan aktor-aktor, kepentingan-kepentingan dan interpretasi-interpretasi. Penelitian ini akan menelusuri aktor-aktor yang memiliki pengetahuan his/herstoris dan keterlibatan aktif dalam konteks dan konstelasi geopolitik proyek pembangunan berbasis lingkungan hidup atau ketahanan pangan di Kalimantan Tengah (kurun waktu 1995-2020).

Tempat utama untuk melakukan penelitian adalah kawasan Eks PLG yang mencakup 2 kecamatan yakni Kecamatan Timpah dan Mantangai yang mencakup 7 desa yang menjadi sasaran program *food estate* yang merupakan desa-desa yang berada di kawasan eks PLG yang mengalami kerusakan relatif parah Lokasi sekitar 120.000 ha, yakni lima desa di kawasan blok A dan 2 desa di kawasan Blok E.

PEMBAHASAN

1. Kritik Kelas Sosial: Perempuan dalam “Sistem Patriarki dan Kapitalisme”

Sumbangsih pemikiran Marx tentang kerja sebagai sumber kekayaan, menarik untuk dipahami dalam kaitan tema tulisan, tentang kritik realitas dunia sosial perempuan dalam relasi yang biner. Marx percaya bahwa pada dasarnya manusia produktif, yakni untuk bertahan hidup manusia perlu bekerja bersama alam. Dengan bertindak demikian, manusia menghasilkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Namun struktur kapitalis menumbangkan sistem kerja dan menumbangkan potensi manusia, sehingga kerja teralienasi dari hakekat manusia. Dan perempuan dalam sistem patriarki-kapitalis menjadi kelompok yang teralienasi, baik dari kerja dan juga hakekatnya sebagai manusia oleh kelompok dominan. (Gurley, 2016)

Selanjutnya, dalam praktek sosial, pihak dominan memanfaatkan perbedaan-perbedaan untuk membenarkan praktek-praktek penindasan dalam model imperioritas-superioritas. Perbedaan tidak dilihat sebagai keragaman, tetapi secara evaluatif yang lebih baik dan yang lebih buruk atau *ordering*. Kondisi ini menyebabkan relasi kerja terbentuk dalam tugas-tugas dan kewajiban dalam hegemoni kekuasaan dalam perbedaan kapitalis-proletar. Konsistensi dari analisis Marx, bahwa relasi produksi akan mempengaruhi relasi keluarga dan pribadi. Sehingga, secara sosial perempuan menjadi kelompok yang tidak bisa melakukan perlawanan dan dikalahkan dalam hegemoni kapitalis dan patriarki. (Armstrong, 2020)

Dominasi patriarkis kapitalis mengendalikan tidak hanya di ranah publik tetapi ekonomi, negara bahkan turut membentuk narasi-narasi sosial yang mendukung sistem patriarkis kapitalis. Sistem kendali ini dapat diamati melalui kegiatan keseharian dan pengalaman perempuan dalam

hubungan dengan pembangunan, melalui teks-teks dan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang menyisihkan tenaga kerja perempuan dalam pembangunan; misalnya iklan rumah ideal dan iklan tubuh perempuan ideal. Dalam hal ini, iklan dipahami sebagai teks (material) yang menarasikan ideologi patriarki.

Feminis sosialis menerima bahwa relasi kelas berdasarkan sistem ekonomi kepemilikan dalam konsep harta benda dan ide kepemilikan laki-laki dalam keluarga menyebabkan kekalahan historis kelas jenis kelamin perempuan. Klaim kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi menghasilkan kelompok lain yang melaksanakan produksi yang disebut dengan pekerja atau pelayan. Dalam sistem keluarga (*familia*), perempuan-isteri-anak perempuan menjadi pelayan yang tunduk dan tidak dibayar, untuk terus meningkatkan nilai surplus, gaya hidup dan kekuasaan pemilik modal (kapitalis). (Armstrong, 2020)

Feminisme sosialisme menggunakan pendekatan materialisme historis yang diperluas, sebagai alat analisis. Feminis sosialis memeriksa bagaimana agensi dominan yang merupakan produk susunan struktural, dalam hal ini susunan struktural dalam masyarakat membentuk konstruksi sosial. Bahwa konstruksi sosial gender dalam struktur sosial bersifat historis dan berada dalam pengetahuan yang memiliki hak istimewa (dominan). Tren terakhir dari feminisme sosialis ialah eko-feminisme, yang mewaspadaikan kaum cendekiawan yang memiliki privilese untuk melayani kepentingan kapitalis.

Oleh sebab itu, kerja penelitian ini adalah proses “pembuatan” pengetahuan sebagai kerja berganda, karena representasi pengalaman dalam kelompok akan berbeda di berbagai tempat. Kerja penelitian ini akan menginterogasi klaim modernitas, mengajukan epistemologi alternatif, *decentering* (pemusatan) dan *dekonstruksi*. Dekonstruksi terhadap narasi besar ilmu pengetahuan yang menjauhkan aspek pengalaman empirik

minoritas dengan cara rasionalisasi terhadap pengetahuan perempuan. (Ritzer, 2019)

Memahami persoalan perempuan harus ditempatkan pada konteks tertentu untuk memahami esensi dan munculnya persoalan bias gendernya. Konteks yang relevan dengan tulisan ini ialah konteks pembangunan dan struktur masyarakat. Dalam berbagai penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa pembangunan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kehidupan perempuan. Konsep pembangunan yang cenderung “barat” mengubah kehidupan tradisional menjadi modern, dalam struktur ekonomi industri menggantikan struktur ekonomi pertanian.

Modernisasi pertanian dengan teknologi yang serba mesin dalam program *food estate* misalnya, berpotensi menghilangkan kesempatan kerja bagi perempuan dan mereduksi peran ekonomi perempuan. Ideologi patriarki-kapitalis menempatkan perempuan sebagai kelas sosial kedua menyebabkan akses perempuan terhadap pengetahuan baru dan teknologi menjadi tertinggal. Kondisi ini kemudian membentuk kesadaran akan perlunya pelibatan perempuan dalam pembangunan. Mengapa perempuan selalu tertinggal atau ditinggal dalam pembangunan? Akar munculnya persoalan perempuan tidak dapat dilepaskan dari faktor ideologi, struktural dan kultural.

Ideologi patriarki yang mengutamakan laki-laki sangat mempengaruhi struktur sosial dan kultural masyarakat yang meminggirkan perempuan, baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan agama. Karena itu dapat dikatakan bahwa persoalan perempuan merupakan manifestasi dari hubungan sosial yang asimetris dalam struktur kelas jenis kelamin. Oleh sebab itu, pendekatan feminis sosialis mengkritisi “perkawinan” patriarki dan kapitalis dalam membentuk sistem sosial yang asimetris tersebut. Proses menuju kesadaran simetris ini sebuah proses yang sangat panjang.

2. Filsafat Kaum Minoritas: Narasi Materialisme Herstory-Feminis Sosialis-Radikal?

Kritik terhadap pengetahuan termasuk sosiologi sebagai narasi besar perlu dilakukan karena pada kenyataannya ia juga meniadakan pengetahuan dan pengalaman serta rasionalitas perempuan. Konstruksi pengetahuan sosial yang bias gender menempatkan perempuan dalam hubungan yang asimetris, yakni rasional-irrasional. Konstruksi ini menyebabkan pengetahuan perempuan dianggap kurang bernilai dan tidak rasional. Ini konstruksi pengetahuan yang sangat seksis. Oleh sebab itu, rasionalisasi kritis terhadap pengetahuan sosial ialah dengan membaca sistem dunia dari perspektif kaum minoritas. Penulis percaya, dalam masyarakat baru kekuatan-kekuatan ini bisa “dibangunkan” dengan menarasikan pengalaman kaum tertindas dan minoritas. Dalam tulisan ini diarahkan pada pengalaman perempuan peladang sebagai kelompok minoritas.

Pada akhirnya, pengetahuan feminisme akan “diciptakan” dari sudut pandang aktor-aktor yang berbeda tempat dalam struktur sosial, dalam hal ini perempuan dari laki-laki. Oleh sebab itu akan selalu bersifat parsial dan “dalam kepentingan”, bervariasi dalam kelompok-kelompok sosial dan selalu akan dipengaruhi oleh relasi kuasa. Inilah yang disebut dengan epistemologi sudut pandang feminis; kaum feminisme berusaha melukiskan, menganalisa dan mengubah dunia dari sudut pandang perempuan yang disubordinasikan dalam relasi sosial secara menyeluruh. Bahwa produksi pengetahuan gender adalah bagian dari sistem kekuasaan yang mengatur semua produksi pengetahuan manusia dalam masyarakat. Produksi pengetahuan feminis bertujuan untuk mengubah keseimbangan kekuasaan dalam wacana dengan menempatkan sudut pandang perempuan secara khusus dan kaum tertindas secara luas sebagai sumber konstruksi pengetahuan sosial.

Pada kenyataannya, dalam sistem sosial perempuan dalam tiga kolektifitas, yakni pemilik, pekerja dan perempuan. Dan secara historis perempuan di bawah patriarki apapun kelas dan ras mereka, telah ditentukan untuk melakukan tugas-tugas reproduksi sosial. Oleh sebab itu, kajian ini akan bertanya bagaimana pandangan dunia (*world view*) perempuan peladang sebagai aktor dalam memahami konstelasi geopolitik terkait dengan pembangunan ketahanan pangan dalam konstelasi kepentingan pangan lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam pendekatan materialisme historis, yang memandang bahwa kondisi material kehidupan manusia termasuk kegiatan dan hubungan berubah sepanjang waktu karena dinamika yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sejarah dipahami sebagai rekaman-tekanan perubahan kondisi material dalam kehidupan kelompok dan perubahan kolektif dalam pengalaman, kepribadian, ide-ide dan susunan sosial, dalam hal ini, adalah dilihat dalam perpektif pengalaman, kepribadian, ide dan susunan sosial perempuan dalam masyarakat.

Penelitian ini mengkaji ketidaksetaraan sosial dalam struktur ekonomi, kebijakan dan ideologi yang menopang sistem dominasi dalam masyarakat. Untuk memetakan sistem ini, maka analisis dilakukan dengan memetakan sistem dominasi publik dan pencarian situasional melalui pengalaman sehari-hari kaum tertindas. Perlibatan kaum tertindas baik individu atau kelompok diharapkan dengan cara yang besar atau kecil, mereka akan belajar bertindak dalam memperjuangkan emansipasi kolektif mereka.

Dalam kerangka ide ini saya mencoba melihat Dayak Misik sebagai eksemplar dari gerakan sosial dan politik identitas, local atau etnis Dayak. Sebagai eksemplar, Dayak Misik dilihat sebagai gerakan masyarakat sipil yang mencoba membangun identitasnya sebagai “alat perjuangan” dalam kontestasi politik

nasional dan global. Isu klaim tanah atau tanah adat penting dalam konstelasi politik lokal di Kalimantan Tengah karena terkait dengan krisis ekologi dan politik-ekonomi pertanian. Gerakan sosial ini menyisakan banyak sisi yang problematik dan belum terpecahkan. Dayak Misik adalah konstruksi identitas khas Dayak yang dimanfaatkan untuk mobilisasi politik. Mengusung identitas Dayak dalam kaitannya dengan hak atas tanah untuk memastikan bahwa Dayak mendapatkan hak formal atas tanah dan hutan yang mereka miliki, aksesnya berdasarkan hukum adat untuk mencegah pengambilalihan oleh perusahaan dan negara. Hanya terdapat kontradiksi skema Dayak Misik, ruang dikonseptualisasikan dengan cara tertentu, mirip dengan teritorialisasi negara, yaitu sebagai tanah yang akan dipetakan dan batas tanah yang kaku. Persepsi ini berbenturan dengan cara anggota Punan Murung yang semi nomaden berinteraksi dengan ruang, karena berbasis ekologi yang saling terkait di mana batasnya fleksibel dan dinamis. (Großmann, 2019)

Penulis melihat terdapat dua konsep yang “bertarung” yakni ‘*frontier ecologies*’, dan *politic forest* untuk menggambarkan bagaimana hutan adat dicukur dan dirampas dengan menggunakan penegakan hukum, teknologi, teritorial, dan zonasi dengan mengkriminalisasi praktik masyarakat lokal. Meskipun hukum adat diabaikan dalam hukum negara, prakteknya hukum adat masih berlaku. Oleh karena itu, akses masyarakat atas tanah tanpa hak dan formalitas, yang seringkali menimbulkan ambiguitas dan konflik pada masa Orde Baru. Setelah reformasi terjadi penguatan pemerintah daerah, komunitas, dan adat. Secara formal, hak-hak pemerintah daerah dan masyarakat adat telah, tetapi undang-undang yang baru saling bertentangan dan pejabat negara menghalangi pelaksanaannya. Dengan demikian, harapan kelompok masyarakat adat akan dukungan negara dalam hal kejelasan hukum dan penegakan hukum

belum terpenuhi. Inilah yang menjadi konteks skema Dayak Misik selanjutnya.

Penulis melihat bahwa Dayak Misik sebagai harapan untuk menangkai perampasan tidak terpenuhi karena terjadi politisasi terhadap adat yang pada kenyataannya menyebabkan konflik multi-dimensional. Ketidakjelasan batas tanah yang diklaim menyebabkan semakin banyak konflik; tidak hanya antara warga desa, negara, dan perusahaan, tetapi juga antar warga desa itu sendiri, yang selanjutnya akan memperparah konflik di wilayah tersebut. Tidak selamanya kolaborasi gerakan sosial antara pemerintah dan masyarakat sipil mencapai titik reformasi dan kesejahteraan masyarakat, bahkan secara terbuka menciptakan konflik baru. Sehingga formulasi terhadap gerakan sosial masyarakat lokal perlu diformulasikan secara seksama dalam konteks yang terpahami baik dalam aras negara dan lokalitas.

PENUTUP:

Reformulasi Gerakan Pemberdayaan Pemberdayaan tanpa Antagonisme

Akhirnya, konsep tentang *Empowerment without Antagonism: A Case for Reformulation of Women's Empowerment Approach* dalam kerangka ide ini menjadi konsep utama sekaligus metode analisis. Bahwa narasi tentang perempuan petani dalam konteks narasi besar tentang pembangunan dan modernisasi perlu "dihidupkan" dengan upaya yang terencana dan strategis, dengan kajian ilmiah. Memformulasikan tentang paradigma pemberdayaan perempuan yang cenderung mencipta antagonisme perempuan dan laki-laki, juga mungkin perempuan dan Negara. Perspektif pembangunan perempuan yang dikembangkan sejak tahun 70an oleh Ester Boserup menjelaskan kesenjangan gender yang terjadi dalam distribusi kerja, sumber daya dan manfaat, dimana dalam strategi pembangunan kebanyakan perempuan ditinggalkan.

Ketidaksetaraan gender itu dibayangkan oleh 2 hal, yakni kapitalistik dan patriarki yang mengeksploitasi nilai-nilai feminis. (Sharma, 2000)

Perspektif perempuan dan pembangunan telah melalui fase yakni WID dan GAD, keduanya berkonsentrasi pada pertanyaan marginisasi perempuan dalam pembangunan. Namun, perspektif ini memiliki keterbatasan sebagai sebuah strategi yang efektif untuk keadilan gender. Molyneux mengajukan usulan untuk melihat hubungan antara kebutuhan praktis dan strategis perempuan yang juga mendapat kritik karena terlalu berbau ekonomi. Namun stimulus Molyneux tentang ide pada "kepentingan strategis" dikembangkan oleh Sara Longwe dalam kerangka analitik untuk penyadaran gender sebagai jalan menuju perspektif pemberdayaan perempuan.

Perspektif pemberdayaan perempuan yang dikembangkan *Harvard framework* menjadi kajian yang cukup penting yang menempatkan 5 level dalam kesetaraan perempuan yakni kontrol, partisipasi, penyadaran, akses dan kesejahteraan (material). 5 aspek ini dibaca dalam 2 cara yakni, *bottom-upward* dan *from top-downward*. Pertama, dari bawah ke atas melihat kesejahteraan materi akan mendorong akses terhadap sumber daya dan manfaat, penyadaran serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kontrol atas kekuasaan. Dalam hal kesenjangan gender kesejahteraan berimplikasi pada pemberdayaan perempuan disemu level dan dalam dimensi sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Bahwa kesejahteraan menjadi inti dalam pemberdayaan yang mempengaruhi semua dimensi. Kedua, dari atas ke bawah, diyakini sebagai hirarki bahwa kontrol atas kehidupan sendiri dalam semua level adalah kunci dari pemberdayaan. Dengan kontrol, kesetaraan gender seperti partisipasi, akses dan kesejahteraan mengikuti. Sehingga diskusi lebih lanjut tentang pemberdayaan perempuan adalah tentang dimensi kekuasaan (*power*);

dalam feminis dipahami sebagai *power to* bukan *power over*.

Hal yang penting dalam kerangka ini adalah kesadaran yang berimplikasi pada kesadaran kritis terhadap dominasi, eksploitasi dan penindasan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, kesadaran memiliki 3 aspek yakni kesadaran generasi perempuan tentang kesenjangan gender dalam hal kesejahteraan materi, kesadaran bahwa kesenjangan gender bukan *God-given* atau sesuatu yang bersifat alami tetapi diciptakan dan mengorganisasi dan menggerakkan perempuan menuju kesetaraan gender.

Penilaian pada pendekatan pemberdayaan perempuan yang disebut "*sponsored*" (oleh pemerintah-top down) dan "*self striven*" (oleh perempuan-dari bawah ke atas). Keduanya kadang dipertentangkan, Moser mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah pemberdayaan yang diorganisasi dan dimobilisasi oleh perempuan sendiri sebagai gerakan perempuan, yang dalam pelaksanaannya kedua pendekatan ini harus melakukan dialektika dari mobilisasi legislasi dan sebaliknya. Dari sini terlihat bahwa perseptif pemberdayaan perempuan berbeda dengan pembangunan perempuan. Pembangunan perempuan adalah proyek sosial-ekonomi, sementara pemberdayaan perempuan adalah proyek politis; bahwa posisi perempuan dalam lingkup ekonomi akan mendorong posisi perempuan dalam politik).

Sharma mengatakan bahwa terdapat 3 kritik kelemahan perseptif pemberdayaan perempuan, yakni dalam perseptif liberal, struktural dan kultural, yang berujung pada kondisi antagonism. Pertama, perspektif liberal memiliki 3 kelemahan, yakni bias eksklusif, orientasi adversarial dan logika suversif yang mereduksi relasi kemitraan laki-laki dan perempuan baik dalam lingkup domestik dan publik. Bahwa urusan pemberdayaan perempuan adalah hanya urusan perempuan. Kedua, perspektif struktural secara instruktik

bersifat psikologis, astruktural dan elitis, terutama dalam membaca skema pemberdayaan Kerangka Pemberdayaan Harvard. Perspektif struktural memiliki masalah dalam memahami level pemberdayaan, kelompok perempuan mana yang urgen diberdayaakan dan pemberdayaan ekonomi dulu atau politik dulu. Terdapat polarisasi dalam memahami pemberdayaan dalam semua kelas sosial perempuan. Ketiga, dalam perspektif kultural, perspektif pemberdayaan perempuan mengandung bias *west ethnocentrism*. Ternyata, relasi gender memiliki variasi dalam semua kultur yang tidak bersifat universal, dalam hal ini dicontohkan dalam kultur masyarakat India dan Indian. Salah satunya, bahwa penyederhanaan terhadap penyebab kesenjangan gender pada katup kapitalisme dan patriakhi tidak dapat memotret raelitas relasi gender dalam masyarakat India.(Sharma, 2000)

Reformulasi terhadap pendekatan pemberdayaan perempuan, mengapa pemberdayaan perempuan bukan pemberdayaan gender? Bahwa masalah perempuan tidak dapat ditangani secara terpisah dari kerangka hubungan gender yang luas. Wawasan seperti itu sebenarnya ditawarkan oleh Caroline Moser (1989) dan Sara Longwe (1991), tetapi itu hilang entah kemana. Inilah saatnya untuk mengambil kembali wawasan itu dan dengan demikian membingkai ulang masalah dalam kaitannya dengan pemberdayaan gender. Bahwa pemberdayaan gender adalah akta ketidakseimbangan dalam hubungan gender dan menekankan perlunya memulihkan keseimbangan. Ini menandakan transformasi relasi gender dari tataran hierarkis ke egaliter ketimbang sekedar mengutak-atik posisi kekuasaan perempuan. Ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan gender dalam kerangka kerja yang saling melengkapi daripada dalam kerangka konflikual. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan gender, pemberdayaan multi-dimensi memiliki harapan yang lebih

besar. Dimensi pemberdayaan seperti sosial, ekonomi dan psikologis, politik. Dalam arti yang lebih luas, pemberdayaan mengacu pada peningkatan kapasitas berbagai ekonomi, psikologis dan, tentu saja, politik.

Pemberdayaan gender adalah gerakan sosial yang harus terencana. Juga terdapat kebutuhan untuk patriaki mendekonstruksi dan kemudian merekonstruksi gerakan sosial pemberdayaan gender ini karena lebih bersifat politis-ekonomis dan kultural. Ini menyiratkan bahwa pemberdayaan gender harus mengelaborasi kekuatan masyarakat dan Negara secara bersama-sama dan juga mengelaborasi kekuatan perempuan dan laki-laki dalam perjuangan yang sama. Pemberdayaan gender bertujuan untuk meningkatkan kepekaan gender tidak hanya pada perempuan tetapi juga laki-laki yang cenderung bias dalam konstruksi. Sudah waktunya bagi laki-laki dan perempuan untuk melampaui identitas gender mereka dan bekerja sama untuk mengubah struktur hubungan gender dari hierarkis menjadi egaliter.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, E. (2020). Marxist and Socialist Feminism. *Smith College*.
- Arrigo, B. A. (2018). Copenhagen School. *The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy, April*. <https://doi.org/10.4135/9781483359922.n95>
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 8(2), 28–42.
- Dittmar, L., & Entin, J. (2016). Introduction: Archives and Radical Education. *Radical Teacher*, 105(105), 1–6. <https://doi.org/10.5195/rt.2016.317>
- Fariyah, I. (2015). Filsafat materialisme Kart Marx (Epistemologi Dialectical and Historical Materialism). *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(2), 431–454.
- Großmann, K. (2019). “Dayak, wake up”: Land, indigeneity, and conflicting ecologies in central kalimantan, Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 175(1), 1–28. <https://doi.org/10.1163/22134379-17501021>
- Gurley, J. G. (2016). Marx and the critique of capitalism. *Alternatives to Economic Orthodoxy: Reader in Political Economy, January*, 273–296. <https://doi.org/10.4324/9781315494258>
- Jrob, U. (1885). *Interlibrary Services IDENTIFICHER □, S U D N B Y E*.
- Outhwaite, W., Turner, S., & Hall, J. R. (2011). Historicity and Sociohistorical Research. *The SAGE Handbook of Social Science Methodology*, 82–101. <https://doi.org/10.4135/9781848607958.n5>
- Program Food Estate Berdampak Positif Bagi Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi - KALTENGTIMES*. (n.d.). Retrieved October 19, 2021, from <https://www.kaltengtimes.co.id/berita-3229/program-food-estate-berdampak-positif-bagi-lapangan-kerja-dan-pertumbuhan-ekonomi>
- Ritzer, G. (2019). *Teori Sosiologi* (10th ed.). Pustaka Pelajar.
- Sharma, S. L. (2000). *Empowerment without Antagonism : A Case for Reformulation of Women ' s Empowerment Approach* Author (s) : S. L. Sharma Published by : Sage Publications , Inc . Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/23619887> *A Case for Reformulation of Women ' s Empo.* 49(1), 19–39.
- Suradinata, E. (2016). Geopolitik Dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.22146/jkn.22056>